



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENINGKATAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

Dian Cahyaningrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.zanggi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebutuhan susu dipastikan meningkat seiring dengan dimulainya program makan bergizi gratis tahun 2025. Merujuk data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis di 2025 mencapai 756,46 juta liter dan kebutuhannya bertambah di 2029 mencapai 3,78 miliar liter seiring meningkatnya sasaran penerima program makan bergizi gratis. Sementara data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat produksi susu lokal hanya memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu (IPS) sebesar 20% atau sekitar 700.000-900.000 ton per tahun dari total kebutuhan susu nasional mencapai 4,4 juta ton per tahun.

Data tersebut menunjukkan meskipun kebutuhan susu banyak, hanya sekitar 20% bahan baku susu yang dipasok dari dalam negeri. Menurut Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, kendala utama dalam pengembangan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) adalah masih sedikitnya populasi sapi perah di Indonesia (sekitar 592 ribu ekor), rendahnya produktivitas sapi perah rakyat (8-12 liter per ekor per hari), dan tingginya rasio biaya pakan dengan hasil produksi susu (0,5-0,6).

Meski hanya 20%, tidak semua produksi susu lokal terserap karena Industri Pengolahan Susu (IPS) lebih banyak melakukan impor. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, susu segar dipasok Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang terdiri dari 59 koperasi dan 44.000 peternak, sedangkan 80% kebutuhan bahan baku susu masih impor. IPS lebih memilih mengimpor susu ketimbang menyerap pasokan lokal disebabkan impor susu bisa jadi lebih murah karena bebas bea masuk. Australia dan Selandia Baru memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas / *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk produk susu sebesar 5%.

Kebijakan IPS yang lebih memilih susu impor mengakibatkan aksi demo. Peternak sapi perah dan pengepul susu sapi di Boyolali dan Pasuruan melakukan aksi protes karena produknya tidak terserap oleh kebijakan pembatasan kuota susu lokal IPS. Aksi protes dilakukan mereka dengan membagikan susu secara gratis, membuang susu ke Tempat Pembuangan Akhir, membuang susu ke sungai, hingga melakukan aksi mandi susu. Jumlah susu yang terbuang sia-sia mencapai 550.000 liter susu.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS), Sonny Effendhi, IPS tidak dapat menyerap produksi susu peternak lokal dikarenakan masalah kualitas yang belum bisa bersaing dengan susu impor. Namun menurut peternak susu lokal, susu yang mereka produksi telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Peternak susu lokal mengakui apabila dibandingkan dengan susu impor yang menggunakan sapi Friesian Holstein, kualitas susu yang dihasilkan memang kalah bersaing, namun tetap berada di atas SNI.

Permasalahan tidak terserapnya produk susu lokal ini ditanggapi langsung oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenperin. Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, selama ini porsi impor susu Indonesia hanya sekitar 40% sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Namun, setelah terdapat *Letter of Intent* antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF), pemerintah mencabut Inpres No. 2/1985 sehingga porsi impor susu Indonesia melonjak hingga 80%. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mewajibkan IPS menyerap susu milik peternak sapi perah lokal terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Rencana ini telah disepakati oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga mendukung upaya Mentan yang mewajibkan IPS menyerap susu segar dalam negeri dari peternak dan pengepul sebagai bahan baku industri.

Peningkatan kualitas dan produksi susu nasional terus diupayakan oleh Kemeperin. Dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo, penyerapan susu yang terstandarisasi dengan baik dapat berkolaborasi dengan koperasi susu, UMKM, IPS, dan peternak susu lokal, sebelum dilakukan impor susu. Penyerapan susu dari peternak lokal seyogyanya menjadi prioritas seluruh stakeholder sebelum impor susu dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan susu nasional. Berkaitan dengan kinerja IPS, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, memaparkan bahwa sampai 2023, realisasi investasi sektor IPS ini sebesar Rp23,4 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 37 ribu orang. IPS merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Atensi DPR

Kebutuhan susu nasional meningkat seiring dengan adanya program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Namun persoalan muncul karena jumlah produksi susu lokal belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional, kualitas produk susu lokal masih kalah bersaing dengan produk susu impor meski telah memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan tidak terserapnya seluruh produk susu lokal dalam Industri Pengolah Susu (IPS) karena IPS lebih memilih mengimpor susu. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, antara lain: 1) memberdayakan dan membina peternak sapi perah agar menghasilkan susu sapi yang lebih banyak dan berkualitas; 2) segera mengeluarkan Perpres yang mewajibkan IPS menyerap susu peternak sapi perah lokal; 3) mengevaluasi kebijakan impor susu agar tidak merugikan peternak sapi perah lokal dan kebutuhan susu nasional terpenuhi dengan baik; dan 4) mendorong IPS berkolaborasi dengan koperasi susu, peternak susu lokal, dan pengepul susu untuk memenuhi kebutuhan IPS.

Sumber

Bisnis Indonesia, 12 November 2024;
indonesia.go.id, 16 Juni 2024;
kompas.com, 12 November 2024;

Kontan, 13 November 2024;
kumparan.com, 12 November 2024; dan
tirto.id, 13 November 2024.



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024